

**Pelaksanaan Sistem Pengawasan Standart Mutu Pangan Kemasan  
Kripik Pisang Agung Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Di Kabupaten Lumajang**

(Studi Implementasi Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004  
tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan)

**JURNAL**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

INDRA BAGUS H. A. P.

0910110173



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

## LEMBAR PERSETUJUAN

**Judul Jurnal** : PELAKSANAAN SISTEM PENGAWASAN STANDART  
MUTU PANGAN KEMASAN KRIPIK PISANG AGUNG  
OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
DI KABUPATEN LUMAJANG (STUDI IMPLEMENTASI  
PASAL 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG  
KEAMANAN, MUTU, DAN GIZI PANGAN)

**Identitas Penulis** :

a. Nama : Indra Bagus Hidayatul Akbar Perkasa  
b. NIM : 0910110173

**Konsentrasi** : Hukum Administrasi Negara

**Jangka Waktu Penelitian** : 4 Bulan

**Disetujui Tanggal** : 29 Juli 2013

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping,

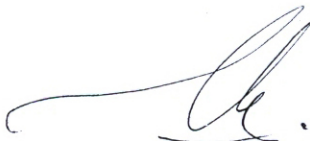


Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S..  
NIP.19510825 197903 1 004



Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.  
NIP. 19770305 200912 2 001

Mengetahui,  
Ketua Bagian  
Hukum Administrasi Negara



Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600810 198601 1 002

**Pelaksanaan Sistem Pengawasan Standart Mutu Pangan Kemasan  
Kripik Pisang Agung Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Di Kabupaten Lumajang  
(Studi Implementasi Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan)**

Indra Bagus H. Akbar P.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : [Indra.bagos@gmail.com](mailto:Indra.bagos@gmail.com)

**ABSTRAK**

Jurnal ini membahas tentang pelaksanaan sistem pengawasan standart mutu pangan kemasan keripik pisang agung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Lumajang. Pilihan tema ini dilatar belakangi karena adanya permasalahan tentang produk makanan kemasan keripik pisang agung yang tidak memenuhi standart mutu pangan kemasan yang masih beredar bebas dipasaran seluruh kabupaten Lumajang untuk diperjual belikan kepada masyarakat. Permasalahan yang diangkat adalah Bagaimanakah pelaksanaan sistem pengawasan standart mutu pangan kemasan keripik pisang agung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Lumajang serta Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengawasan standart mutu pangan kemasan keripik pisang agung di Kabupaten Lumajang dan bagaimana solusinya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang. Sumber data diperoleh melalui wawancara maupun studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa Pelaksanaan sistem pengawasan standart mutu pangan kemasan keripik pisang agung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Lumajang dapat dilakukan dengan cara manajemen keamanan pangan dan analisis mutu. Penerapan Manajemen Mutu Terpadu.

Faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan sistem pengawasan adalah kurangnya pengetahuan serta ketidakpedulian produsen terhadap standart mutu pangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta minimnya pengetahuan yang didapat masyarakat mengenai dampak atau bahaya jika masyarakat sebagai konsumen terus mengkonsumsi makanan kemasan yang tidak sesuai dengan standart mutu keamanan pangan.

Saran dari penulis adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang melakukan pembinaan secara intensif terhadap produsen keripik pisang agung mengenai standart sanitasi yang baik agar mampu menghasilkan produk keripik pisang agung yang bermutu dan berkualitas serta aman dikonsumsi.

**Kata Kunci :** Pengawasan Standart Mutu Pangan, Keripik Pisang Agung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang.

## **ABSTRACT**

### **PENDAHULUAN**

Pangan merupakan kebutuhan pokok setiap manusia guna menunjang kelangsungan hidupnya. Dimana pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional. Tanpa makan dan minum yang cukup dalam jumlah dan mutunya, manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya. Pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia secara cukup merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta makin berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi sangat penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan, dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kesehatan. Masalah mutu pangan menyangkut pula keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia yang mengkonsumsinya untuk jasmani dan rohani.<sup>1</sup>

Produk pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui suatu mata rantai proses yang meliputi, produksi, penyimpanan, pengangkutan, peedaran hingga sampai ditangan konsumen. Agar seluruh kegiatan mata rantai tersebut memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi, maka perlu diwujudkan suatu sistem pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang efektif dibidang keamanan, mutu dan gizi pangan.<sup>2</sup> Dalam pasal 29 dan pasal 30 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen<sup>3</sup> menjelaskan mengenai tugas pemerintah dalam Pembinaan dan Pengawasan mengenai perlindungan konsumen.

---

<sup>1</sup> Celina Tri Siwi Kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.169

<sup>2</sup> Jhon Pieris dan Wiwik Sri Widiarti, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, Pelangi Cendekia, Jakarta, 2007, hlm.60

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (online), 1999, <http://www.dikti.go.id/files/atur/sehat/UU-8-1999PerlindunganKonsumen.pdf>, diakses pada tanggal 14 januari 2013.

Mengenai keamanan pangan yang diproduksi dan diperdagangkan kekonsumen, diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.<sup>4</sup> Pada pasal 2 dijelaskan bahwa setiap orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pada rantai pangan yang meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan yang meliputi; sarana dan/atau prasarana, penyelenggara kegiatan, dan orang perseorangan. Lembaga pemerintah yang berwenang dalam mengatur serta mengawasi tata cara produksi makanan olahan dalam hal ini keripik pisang agung adalah kewenangan dari Kementerian Perindustrian. Namun dalam kewenangannya di daerah, berdasarkan pelimpahan kewenangan atau biasa disebut Desentralisasi, maka yang berwenang dalam cara produksi pangan olahan yang baik dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di wilayah masing-masing daerah.

Kabupaten Lumajang merupakan penghasil pisang terbaik. Pisang unggulan dari hasil agro kabupaten Lumajang salah satunya adalah Pisang Agung yang mana merupakan komoditas agro utama bagi Lumajang. Pisang agung tersebut diolah dan dikembangkan menjadi berbagai jenis makanan ringan. Salah satunya berupa kripik pisang. perkembangan industri untuk produksi kripik pisang agung ini berkembang pesat dan penjualannya pun hingga sampai keluar pulau Jawa.<sup>5</sup> Banyak produsen dari industri rumah tangga ini yang tidak mengantongi izin produksi dari dinas terkait di Kabupaten Lumajang. tidak memiliki sertifikat produksi pangan yang aman untuk dikonsumsi bagi masyarakat. Dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Lumajang berhak melakukan pengawasan bagi produk industri rumahan yang dalam hal ini adalah Kripik pisang agung yang beredar di pasaran untuk diperdagangkan ke masyarakat agar masyarakat sebagai pembeli atau konsumen tidak menjadi korban akibat adanya

---

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (online), 2004, diakses pada tanggal 9 Januari 2013.

<sup>5</sup> [http://google.usahakripikpisanglumajang.\\_abi/djup/ryan](http://google.usahakripikpisanglumajang._abi/djup/ryan), diakses pada tanggal 15 desember 2012

produk kripik pisang yang tidak memenuhi standart mutu dan keamanan pangan. Namun, fakta yang ada masih banyak produk industri rumahan kripik pisang yang tidak memenuhi kriteria standart mutu dan keamanan pangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku beredar bebas di pasaran. Terutama pasar tradisional dan toko-toko kelontong.

Sehingga menimbulkan asumsi bahwa terjadi tingkat lemahnya dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Lumajang dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kripik pisang agung yang tidak memenuhi standart mutu pangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004. Pelaksanaan sistem pengawasan yang efektif dapat mencegah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan menghindari ketidaksesuaian antara peraturan dengan apa yang ada di lapangan. Pelaksanaan sistem pengawasan ini meliputi proses pemeriksaan secara langsung terhadap para pedagang yang menjual kripik pisang agung yang tidak memenuhi standart mutu keamanan pangan yang berada di wilayah Kabupaten Lumajang. Pelaksanaan pengawasan yang efektif dan berkesinambungan dapat menekan dan mengurangi pelanggaran yang terjadi terhadap peredaran kripik pisang agung kemasan di pasaran.

Bertolak dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis mengambil judul: "Pelaksanaan Sistem Pengawasan Standart Mutu Pangan Kemasan Kripik Pisang Agung Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Di Kabupaten Lumajang (Study Implementasi Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan)".

## MASALAH

1. Bagaimanakah pelaksanaan sistem pengawasan standart mutu pangan kemasan kripik pisang agung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Lumajang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengawasan standart mutu pangan kemasan kripik pisang agung di Kabupaten Lumajang dan bagaimana solusinya?

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada norma-norma hukum perlindungan konsumen yang berlaku undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan teori-teori perlindungan konsumen yang ada kemudian dikaitkan dengan pelaksanaan pengawasan standar mutu pada produksi makanan industri rumah tangga oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai upaya perlindungan konsumen yang dilakukan dalam praktek lapangan berdasarkan peraturan yang berlaku peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang standart, mutu, dan keamanan pangan dan berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Lokasi penelitian ini adalah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang. Jenis dan sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan bahan yang di dapat dari sumbernya secara langsung dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang, Data sekunder yaitu data yang berupa doktrin, pendapat dan sebagainya yang terdapat pada sumber kepustakaan, literatur dan dokumen yang mendukung data primer yang merupakan pedoman dalam melanjutkan penelitian terhadap data primer yang ada di lapangan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan standar mutu produksi makanan industri rumah tangga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang dan pelaku usaha Industri rumah tangga serta konsumen di kabupaten Lumajang. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala bidang perdagangan Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Lumajang; Seksi kemetrolagian dan perlindungan konsumen Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Lumajang; Seksi tim pengawas lapangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang.

## PEMBAHASAN

Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) terdiri dari tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu *Good Manufacturing Practices (GMP)*, *Standard Sanitation Operating Procedures (SSOP)*, dan *Hazard Analysis and Critical*

*Control Point* (HACCP). Sebagai kelayakan dasar dari PMMT, GMP harus dilaksanakan dahulu secara baik sehingga akan dihasilkan pangan dengan kualitas yang sama. GMP adalah bagaimana cara menghasilkan bahan pangan dengan mutu relative dengan mutu sebelum dan setelahnya. SSOP adalah prosedur standar operasi sanitasi untuk mencegah terkontaminasinya bahan baku pangan. Tahapan SSOP meliputi bahan baku, peralatan, pekerja, dan lingkungan steril. Setelah GMP dan SSOP dapat dilaksanakan sesuai prosedur, maka sudah selayaknya apabila akan menerapkan HACCP. Berdasarkan pelaksanaannya, HACCP dapat dibagi menjadi dua, yaitu analisis bahaya (HA) dan penentuan titik kritis (CCP). Analisis bahaya adalah penentuan titik-titik bahaya yang mungkin ada pada alur proses produksi bahan pangan.

Sistem Manajemen Mutu (SMM) merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk mengendalikan agar produk yang dihasilkan perusahaan (baik barang maupun jasa) memiliki kualitas yang baik. Untuk itu barang / produk yang tidak sesuai perlu dikendalikan. Produk tidak sesuai yang dimaksud adalah produk (barang atau jasa) yang tidak sesuai dengan persyaratan/spesifikasi yang telah ditentukan. Ketidaksesuaian dapat diartikan sebagai suatu penyimpangan yang muncul dari standar yang sudah ditetapkan. Dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian dapat diketahui melalui keluhan pelanggan, audit internal, audit eksternal, pemeriksaan bahan masuk atau selama kegiatan pengujian dan inspeksi.<sup>6</sup> Pencemaran yang dialami oleh bahan pangan akan mempengaruhi mutu produk yang dihasilkan. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah pencemaran bahan pangan dapat menyebabkan sakit atau keracunan bagi konsumen yang mengkonsumsinya. Berdasarkan pasal 4 UUPK nomor 8 tahun 1999 tentang hak-hak konsumen bahwa konsumen berhak mendapatkan kenyamanan dalam mengkonsumsi suatu produk. Hal ini tidak lepas dari campur tangan pemerintah untuk melindungi masyarakatnya. Fungsi pemerintah dalam hal ini adalah melakukan suatu pengawasan terhadap peredaran produk makanan di pasaran, baik pasar tradisional maupun pasar modern. Dalam pasal 2 peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan bahwa Setiap orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pada rantai

---

<sup>6</sup> Khairul Umam, ST, BA & Zulherbi, S.TP. *Pengendalian Produk Tidak Sesuai (Non-Conforming Product)* Konsultan ISO Artike ISO 9001, ISO 9001:2008, Konsultan ISO, 12 februari 2013.



pangan yang meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga mengupayakan kondisi yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Untuk menciptakan semua ini, perlu adanya suatu tata kelola berdasarkan perencanaan, pengorganisasian, penyelenggaraan dan pengendalian yang efektif dan efisien. Melalui kinerja pemerintah baik pusat maupun daerah yang dilakukan oleh Dinas perindustrian dan perdagangan diharapkan dapat terwujud suatu produk pangan yang memenuhi standart mutu pangan. Terutama bagi produk unggulan Kabupaten Lumajang yaitu keripik pisang agung. Pelaksanaan pengawasan standart mutu pangan Dinas Perindustrian dan perdagangan melakukan inspeksi langsung ke pasar-pasar tradisional di Kabupaten Lumajang, toko kelontong, agen kripik pisang serta pasar-pasar modern dan toko besar yang menjual pangan kemasan kripik pisang agung Lumajang. Jika Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendapati keripik pisang agung yang tidak sesuai dengan standart mutu pangan kemasan dan tidak layak beredar di pasaran untuk dijual kekonsumen, dinas tersebut memberi pengarahan kepada pedagang untuk tidak menjual keripik pisang tersebut. Kalau perlu keripik pisang tersebut harus dikembalikan kepada produsen. Karena Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak mempunyai wewenang untuk menyita barang tersebut dari pedagang. Yang berhak untuk menyita barang yang tidak sesuai standart mutu untuk diperdagangkan adalah Satuan Polisa Pamong Praja maupun korps kepolisian kabupaten Lumajang yang disertai dengan surat perintah penyitaan barang dagangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. Kemudian juga Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan penyuluhan dan pelatihan serta sosialisasi tentang cara produksi yang baik dan prosedur sanitasi yang baik serta memenuhi standart mutu pangan kemasan yang baik pula dengan cara mendatangkan narasumber dari anggota penyuluh dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Lumajang juga para akaemisi dari berbagai universitas dan melakukan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintahan di Kabupaten

Lumajang yang terkait dengan masalah standart mutu pangan kemasan khususnya kripik pisang agung.<sup>7</sup>

Dalam melakukan pelaksanaan pengawasan produk kripik pisang agung yang sesuai dengan standart mutu dan keamanan pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki faktor yang mendukung kelancaran berjalannya tugas tersebut. Antara lain adalah Adanya Undang - Undang dan Peraturan Yang Mendukung kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang dalam melakukan tugas pengawasan untuk peredaran produk makanan telah diatur dalam berbagai macam peraturan dan undang - undang yang berlaku di Indonesia. Undang - undang yang mengatur diantaranya adalah undang - undang tentang perlindungan konsumen, undang - undang tentang pangan, serta peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan serta peraturan daerah tingkat provinsi Jawa timur nomor 2 tahun 2010 tentang tata kelola produk unggulan pertanian dan perikanan di Jawa Timur. Dan juga Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga dibantu dalam berkoordinasi dengan lembaga lain yang berwenang, antara lain adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, Satuan Polisi Pamong Praja, Korp Kepolisian, serta berbagai pihak lain yang terkait. Karena setiap Dinas tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing sebagai lembaga pemerintah yang sah dan legal. Hal ini demi terciptanya ketentraman serta perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen.

Dalam melakukan pengawasan berbagai macam produk makanan kemasan terutama kripik pisang agung Lumajang, Dinas Perindustrian dan perdagangan juga banyak menghadapi hambatan. Sehingga pemenuhan produk makanan kemasan kripik pisang agung Lumajang masih banyak yang tidak sesuai dengan standart mutu pangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Faktor penghambat tersebut berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal, yaitu;

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menerima dana dari pemerintah daerah Kabupaten Lumajang sangat minim dan sangat terbatas untuk melakukan kinerjanya. Dari APBD Kabupaten Lumajang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya mendapat dana sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) saja tiap tahunnya pada anggaran

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Vina Kurniawati, penyuluh lapangan Disperindag, tanggal 4 juni 2013.

APBD.<sup>8</sup> Dana tersebut yang didapatkan dari suntikan dana dari pemerintah daerah sangat tidak cukup untuk melakukan sidak dan operasi pengawasan terhadap pangsa pasar tradisional dan pasar modern yang ada di Kabupaten Lumajang, termasuk untuk melakukan penyuluhan terhadap produsen industri rumah tangga.

2. Terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang sangat menentukan kelancaran dari bentuk pelaksanaan kinerja dalam melakukan pengawasan berdasarkan sistem yang ada terhadap produk keripik pisang agung industri rumah tangga di Kabupaten Lumajang. Kurangnya tenaga penyuluh dan pengawas yang berada dilapangan yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan sangat menghambat kinerja dalam melakukan operasi dan inspeksi pangan kemasan keripik pisang agung yang beredar di pasaran tradisional maupun pasar modern.
3. Tidak adanya tugas dan fungsi pokok yang secara tegas mengatur mengenai pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang terhadap keamanan dan standart mutu pangan kemasan keripik pisang agung di Kabupaten Lumajang.
4. Salah satu hambatan adalah tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat yang rendah menjadi dasar pemicu bagi masyarakat tetap membeli produk pangan kemasan keripik pisang agung untuk di konsumsi tanpa memperhatikan keamanan dan standart mutu dari pangan kemasan tersebut. produsen memproduksi keripik pisang yang bermutu rendah karena semata-mata permintaan dari masyarakat atau konsumen itu sendiri. Kebanyakan penduduk di Kabupaten Lumajang sebagian besar hanya sebatas tamatan Sekolah Dasar (SD) saja dan hanya sebagian kecil yang mengenyam pendidikan sampai tamat SLTA. Penghasilan mereka sangatlah minim. Hanya cukup untuk membeli kebutuhan pokok saja. Sehingga, ketika mereka ingin membeli kebutuhan tambahan seperti ingin membeli keripik pisang agung, mereka akan membeli keripik pisang

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Vina Kurniawati, penyuluh lapangan Disperindag, tanggal 4 juni 2013.

agung kemasan yang murah dengan mutu yang sangat rendah sebagai kudapan dan kurang aman untuk dikonsumsi bagi masyarakat tersebut.

5. Rendahnya pengetahuan produsen terhadap peraturan standart mutu keamanan pangan serta dampak dan resiko yang diterima baik bagi produsen itu sendiri maupun bagi konsumen yang mengkonsumsinya. Sifat dari produsen yang hanya mengutamakan keuntungan saja tanpa memperhatikan mutu keamanan pangan yang diproduksinya untuk dijual kepada konsumen. Sehingga konsumenlah pada akhirnya yang dirugikan.
6. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan pangan keripik pisang agung yang tidak memenuhi standart mutu keamanan pangan sangat rendah tetap beredar di pasaran. Jika suatu produk keripik pisang yang tidak mencantumkan salah satu persyaratan tersebut diatas, konsumen dapat melaporkan produk tersebut kepada pihak yang berwajib untuk ditindak lanjuti karena keripik pisang agung tersebut tidak memenuhi standart mutu keamanan yang telah ditentukan oleh pemerintah melalui undang-undang. Mereka kebanyakan bersikap pasif saja.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang berusaha mencari solusi terbaik untuk mengatasi hambatan tersebut demi memberikan perlindungan konsumen terhadap masyarakat Kabupaten Lumajang. antara lain yaitu:

1. Mengajukan Upaya Penambahan Dana Operasional dari APBD kabupaten Lumajang yang digunakan untuk sarana dan prasarana untuk melakukan pelaksanaan sistem pengawasan peredaran produk makanan kemasan keripik pisang agung serta penyuluhan terhadap seluruh produsen industri rumah tangga yang memproduksi keripik pisang agung di Kabupaten Lumajang.
2. Hal penting upaya yang harus dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang untuk kelancaran tercapainya tujuan melakukan pengawasan peredaran produk pangan kemasan keripik pisang agung di Kabupaten Lumajang adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia menjadi lebih terdidik dan terlatih dalam bidangnya masing-masing.

3. Meminta Dan Mendesak Pemerintah Serta DPRD Kabupaten Lumajang Untuk Segera Mengesahkan Peraturan Daerah Mengenai Tugas Dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang.
4. Memberi Pengetahuan secara aktif maupun pasif Kepada Masyarakat Tentang Standart Mutu Kesehatan Pangan Serta Meningkatkan Kesadaran Mereka Untuk Segera Melapor Jika mengalami pelanggaran hak - hak atas konsumen.
5. Memberi Penyuluhan Secara Aktif Kepada Para Produsen Industri Rumah Tangga Keripik Pisang Agung. Produsen harus mengetahui tata cara sanitasi produksi yang sehat sesuai dengan pasal 2 peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004. Produksi yang sehat, bersih dan higienis mampu melindungi konsumen sebagai pembeli berdasarkan pada undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Pelaksanaan sistem pengawasan standart mutu pangan kemasan keripik pisang agung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Lumajang dapat dilakukan dengan cara manajemen keamanan pangan dan analisis mutu. Tujuannya untuk mengendalikan agar produk yang dihasilkan industri rumah tangga memiliki kualitas yang baik. Untuk itu barang / produk yang tidak sesuai perlu dikendalikan agar tidak sampai ke tangan konsumen.
2. Faktor yang mendukung Pelaksanaan Pengawasan Standart Mutu Pangan adalah adanya undang-undang dan peraturan yang mendukung serta Keharmonisan hubungan kinerja antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan lembaga pemerintahan Kabupaten Lumajang yang lain.

Sedangkan faktor yang menghambat Pelaksanaan Pengawasan Standart Mutu Pangan adalah masalah yang berasal dari dalam lembaga internal Disperindag itu sendiri maupun yang berasal dari eksternal.

**Saran**

1. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang untuk menerapkan sistem manajemen mutu dan keamanan pangan sesuai dengan standart mutu pangan dalam pembinaan melalui penyuluhan maupun pengawasan agar produk keripik pisang kemasan yang tidak sesuai dengan standart mutu tidak sampai beredar di pasaran dan sampai ketangan konsumen untuk dikonsumsi.
2. Pelaku usaha agar menambah wawasan pengetahuan mengenai standart kelayakan produksi sesuai dengan syarat sanitasi yang baik agar mampu menghasilkan produk keripik pisang agung yang bermutu dan berkualitas. Sehingga aman untuk dikonsumsi bagi masyarakat luas. Dan juga dapat mencegah terjadi pelanggaran hak-hak konsumen.
3. Bagi konsumen atau masyarakat kabupaten Lumajang untuk lebih berhati-hati dan mampu memilih barang yang bermutu dan baik bagi kesehatan dalam membeli produk pangan kemasan khususnya makanan kemasan keripik pisang agung.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Celina Tri Siwi Kristianti, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Jhon Pieris dan Wiwik Sri Widiarti, **Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa**, Pelangi Cendekia, Jakarta, 2007.

Khairul Umam,ST, BA & Zulherbi,S.TP. **Pengendalian Produk Tidak Sesuai (Non-Conforming Product)**, Konsultan ISO Artike ISO 9001, ISO 9001:2008, Konsultan ISO, 12 februari 2013.

### UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Kelola Produk unggulan.